

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan prinsip demokrasi. Meskipun penting, pemilihan umum bukanlah tujuan akhir dari demokrasi, melainkan sebagai alat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Tujuan utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kehidupan bangsa, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Secara teknis, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor kunci dalam proses pemilihan.

Di negara berkembang partisipasi politik diperkenalkan dengan dua model. Dua model tersebut yaitu partisipasi yang bersifat demokratis dan partisipasi yang bersifat Totaliter. Negara demokratis dapat membuka kesempatan terhadap semua kalangan untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik sebagai warga negara yang berpengaruh. Sedangkan yang Totaliter memberikan tugas pokok sebagai partisipan. Walaupun pada kenyataannya bentuk demokrasi Partisipatif juga merupakan bagian dari pola partisipasi totaliter, baik dalam arti formal maupun fungsional, karena bentuk demokratis dari sistem partisipatif menuntut adanya keserasian kebudayaan politik (Nurhadi & Sunarso, 2018).

Pemilihan umum legislatif adalah proses demokratis yang diadakan untuk memilih para anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini merupakan mekanisme di mana rakyat berpartisipasi dalam menentukan wakil-wakil yang akan mewakili aspirasi mereka dalam lembaga legislatif. Pelaksanaan pemilihan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

sistem demokrasi perwakilan, meskipun kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui lembaga legislatif atau parlemen.

Para caleg DPRD Dapil 6, terutama yang berhasil mendapatkan suara tertinggi seperti K.H. Muhammad Thamrin, cenderung memiliki latar belakang yang beragam, tetapi seringkali terkait erat dengan urusan keagamaan dan aktivitas sosial di wilayah tersebut. Banyak dari mereka memiliki pengalaman dalam organisasi keagamaan atau lembaga masyarakat sipil yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, atau kemanusiaan. Beberapa mungkin juga memiliki latar belakang profesional dalam bidang yang relevan, seperti pendidikan, hukum, atau kesehatan. Selain itu, kemungkinan besar mereka memiliki keterlibatan yang kuat dalam komunitas lokal dan telah membangun hubungan yang solid dengan tokoh-tokoh penting di wilayah tersebut, termasuk elite keagamaan, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal lainnya. Dengan latar belakang ini, para caleg berupaya untuk memanfaatkan jaringan dan pengalaman mereka untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan memenangkan pemilihan.

Berikut adalah rekapitulasi hasil suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur yang menampilkan persaingan sengit antara calon anggota dewan legislatif (caleg) petahanan dan pendatang baru di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Dapil ini mencakup empat kecamatan di Jakarta Timur: Ciracas, Makasar, Cipayung, dan Pasar Rebo, yang memiliki total 10 kursi. Menariknya, baik caleg petahana maupun pendatang baru berhasil meraih lima kursi masing-masing. PKS memimpin dengan dua kursi, sementara PDIP dan Gerindra mengalami penurunan satu kursi dari pemilu sebelumnya, sehingga keduanya hanya memiliki satu wakil dari Dapil Jakarta 6. Penurunan kursi dari PDIP dan Gerindra berhasil diisi oleh PKB dan NasDem. Sementara itu, Golkar, PAN, Demokrat, dan PPP tetap mempertahankan satu kursi dari Dapil Jakarta 6.

Tabel 1.1. Daftar Caleg Daftar yang berhasil lolos dalam Pemilu 2024

No.	Partai	Nama Calon	Jumlah Suara
1.	PKB	Ahmad Moetaba	15.121
2.	Gerindra	Ryan Kurnia Ar Rahman	19.956
3.	PDIP	Manuara Siahaan	9.037
4.	Golkar	Sardy Wahab Sardi	12.803
5.	NasDem	Raden Gusti Arief	5.300
6.	PKS	K.H. Muhammad Thamrin	36.274
7.	PKS	Muhammad Al Fatih	12.844
8.	PAN	Bambang Kusumanto	9.593
9.	Demokrat	Misan Samsuri	15.585
10.	PPP	Matnoor Tindoan	30.541

Hasil rekapitulasi suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dapil 6 menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam Pemilu kali ini. PKS berhasil meraih jumlah suara yang mengesankan, dengan suara partai 32.815 suara, PKS memperoleh posisi yang terdepan dalam hal jumlah kursi yang berhasil diraih. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, PKS mampu mengamankan dua kursi di DPRD DKI Jakarta dari dapil yang meliputi Ciracas, Makasar, Cipayung, dan Pasar Rebo. Keberhasilan ini tidak hanya menegaskan popularitas partai di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan kesesuaian antara visi partai dan harapan pemilih di wilayah tersebut. Dengan hasil ini, PKS akan memegang peran penting dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif, mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka layani.

Tabel 1.2. Daftar Caleg PKS

No.	Nama Calon	Jumlah Suara
1.	K.H. Muhammad Thamrin, M.M.	36.274
2.	Muhammad Al Fath, S.Ak.	12.844
3.	Dian Parwita H.	6.578
4.	Firmansyah, S.I.P., M.Si	5.362
5.	H. Rudi Purnama, S.T.	10.104
6.	Sulistyaati	2.709
7.	H. Jaenal Abidin, A.Md.	3.488
8.	H. Karyatn Subiyantoro	10.578
9.	Sri Nurhayati	1.473
10.	Musthofa Faruq, S.H., M.H.	3.288

Hasil rekapitulasi suara dari seluruh partai politik yang berkontestasi dalam Dapil 6 menunjukkan gambaran yang menarik tentang dinamika politik di wilayah tersebut. Dengan empat kecamatan yang tercakup, yakni Ciracas, Makasar, Cipayung, dan Pasar Rebo, pemilih memberikan dukungan yang beragam kepada berbagai partai politik. Meskipun demikian, beberapa partai mampu memperoleh hasil yang lebih menonjol daripada yang lain. PKS, misalnya, muncul sebagai pemenang dengan meraih dua kursi, menunjukkan popularitas dan pengaruh yang kuat di antara pemilih. Sementara itu, partai lain seperti PDIP, Gerindra, PKB, dan NasDem juga berhasil meraih satu kursi masing-masing, mencerminkan diversitas dukungan politik di wilayah tersebut. Hasil ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam preferensi pemilih, serta akan memberikan dampak yang signifikan dalam komposisi dan representasi politik di DPRD DKI Jakarta.

Hasil pemilu tidak hanya dilihat sebagai pemilu yang sederhana, tetapi juga sebagai sistem politik yang membawa kebebasan dalam kerangka kebijakan ekonomi. Penggunaan emosi dini, khususnya agama, di satu sisi berdampak positif terhadap pilkada. Misalnya, pengaruh tokoh agama yang diwakili tokoh agama dalam hal ini akan berdampak pada keamanan dan kedamaian pemilu. Karena otoritas agama sebagai figur kharismatik pemilih akan berperan sebagai faktor pemersatu dengan membuat atau memberikan “fatwa”. Namun di sisi lain, keterlibatan otoritas agama dalam kasus ini bukanlah hal yang aneh. Terlalu banyak partisipasi ulama hanya akan menjadi bumerang, karena akan menyebabkan

kerusakan serius dengan memecah belah pemilih dalam masyarakat dan politik. Hal ini dapat mengarah pada etnosentrisme. Kerusakan dapat terjadi jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik (Ngadhimah, 2016).

Seiring dengan memasuki tahap penelitian yang mendalam, tampaknya ada kebutuhan untuk menjelajahi fenomena menarik terkait preferensi pemilih di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuktikan apakah masih ada pemilih yang cenderung menilai dan memilih calon berdasarkan peran atau ketokohnya dalam masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian karena dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik lokal yang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tradisional seperti keberadaan tokoh atau figur yang dihormati dalam komunitas. Dengan pendekatan penelitian yang teliti dan analisis yang mendalam terhadap data yang terkumpul, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola pemilih dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan di wilayah tersebut.

Dalam konteks munculnya calon legislatif (caleg) dari latar belakang agamis seperti ustadz atau ustadzah di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta, menjadi perhatian bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan tersebut. Namun, di antara mereka, terdapat satu figur yang dapat disebut sebagai elite agama yang sejati, yaitu K.H. Muhammad Thamrin. Penelitian ini menyoroti bahwa Thamrin bukan hanya seorang ustadz, tetapi juga memiliki posisi yang istimewa dalam masyarakat berkat taklimnya yang telah mapan dan jaringan taklim yang luas. Sebelum terjun ke dunia politik, Thamrin berasal dari keluarga kyai yang sangat dihormati dalam komunitasnya. Dengan demikian, penelitian ini akan mendalami peran dan pengaruh Thamrin sebagai elite agama, serta bagaimana hal ini memengaruhi preferensi pemilih dalam konteks politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan terhadap calon dari latar belakang agamis di wilayah tersebut.

Wacana agama tidak dapat dipisahkan dari ruang publik. Karena kehidupan dan peran agama merupakan perubahan nilai-nilai seperti pengertian nilai-nilai

moral dengan hukum-hukum yang kuat dalam akal manusia. Agama bukan hanya budaya, tetapi juga sikap politik yang sering digunakan para politikus dan politikus dalam pemilu. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa agama berfungsi tidak hanya di ruang privat, tetapi juga di ruang publik, dan memainkan peran penting bagi manusia di kedua ruang: simbol dan kepercayaan sosial, budaya dan politik (Diinis Sipa, 2021).

Dalam perkembangannya, elite agama tidak hanya terlibat dalam pengabdian di pesantren, tetapi juga terlibat dalam aspek lain di luar pesantren, seperti politik, kepemimpinan daerah, dan profesi lainnya. Elite politik di daerah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang berada di parlemen dan yang tidak, tetapi keduanya berpengaruh terhadap kemajuan partai politik.

Dalam lingkungan masyarakat yang agamis, para tetua agama atau tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dan bisa mengarahkan masyarakat melalui fatwa dan arahan mereka. Namun, dalam kondisi politik yang berbeda, ada juga elite birokrasi yang fokus pada pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih ada angka Golput yang bervariasi, yang tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga oleh apatisisme (Chalik, 2016).

Penganut ajaran Islam dapat dipilah menjadi “kelompok Islamis” dan “Kelompok Nasionalis”. Golongan nasionalis yang berprinsip bahwa ad-Din wa ad-Daulah (agama dan negara) harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurus ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, Sedangkan negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi. Sementara itu golongan Islamis berprinsip bahwa agama (dalam hal ini Islam) tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena Islam menurut mereka tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama. Perbedaan pandangan antara kedua kelompok ini akan selalu mewarnai kehidupan perpolitikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Jalal, 2018).

Dalam komunitas NU, kyai menempati posisi yang sangat terhormat, terutama dalam struktur kepengurusan. Biasanya, mereka menduduki posisi di Syuriah, lembaga yang mengkaji masalah hukum Islam dan berperan sebagai

majelis pertimbangan utama dalam kebijakan organisasi. Namun, kiai juga banyak ditemukan di Tanfidziyah dan lembaga otonom lainnya, tergantung pada kebutuhan dan wilayahnya.

Kapasitas untuk berbuat lebih banyak untuk sekelompok orang ada di masing-masing yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok, itu adalah pemimpin agama. Para pemuka agama adalah mayoritas umat Islam yang sangat dihormati masyarakat karena ilmunya, akhlaknya, perilakunya dan kebaikannya dalam perjuangannya menegakkan syariat Islam karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Islam. Praktik keagamaan termasuk mereka yang berperan dalam masyarakat. Tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial dalam masyarakat modern dan demokratis. Kepemimpinan dapat disebut kepemimpinan informal karena masyarakat mengakui seseorang sebagai pemimpin.

Konteks historis pendirian Nahdlatul Ulama (NU) memberikan wawasan penting untuk memahami latar belakang dan motivasi di balik peran K.H. Muhammad Thamrin. NU didirikan pada tahun 1926 sebagian sebagai respons defensif terhadap munculnya kekuatan puritan dan anti-tradisi dari pemikiran Islam Wahhabisme. Wahhabisme, yang muncul seiring dengan transisi global di dunia Islam setelah penghapusan Kekhalifahan Utsmani, menolak banyak praktik tradisional yang berlaku di masyarakat Muslim.

Sebagaimana dinyatakan, "Nahdlatul Ulama was established partly as a defensive response to the emerging force of a puritan, anti-tradition School of Islamic Thought of Wahhabism during the global transition in the Islamic World in 1924, when Utsmany Empire or Caliph was abolished and was followed by the existence of nation-based Muslim countries. One of them is the Saudi Arabia state whose establishment was supported by and in collaboration with this Wahabbism, that was anti-tradition practices prevailing in some segments of the societies across the Islamic World." (Zamharir et al., 2020)

Kutipan ini menggambarkan bagaimana NU berfungsi sebagai pelindung tradisi Islam di tengah perubahan sosial dan politik yang signifikan. K.H. Muhammad Thamrin, sebagai bagian dari warisan NU, juga mengambil peran serupa dalam menjaga nilai-nilai dan praktik tradisional Islam di Indonesia. Dalam

kontestasi politik, Thamrin memanfaatkan jaringan taklim dan reputasinya untuk meraih dukungan politik dan mempengaruhi preferensi pemilih, terutama dalam menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi yang lebih puritan dan anti-tradisi.

Dalam proses pemilihan langsung, tokoh agama yang merupakan bagian dari rakyat memiliki posisi strategis yang sangat penting. Mereka memiliki kemampuan untuk berfungsi dan berpengaruh karena mereka memiliki keunggulan bawaan bahwa mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dan cabang ini dapat menjalankan fungsi dan pengaruh tersebut, menentukan gaya dan arah roda kehidupan. Mereka adalah minoritas yang diistimewakan, berada di puncak hierarki sosial, mampu mengendalikan kegiatan ekonomi dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun jumlahnya kecil, mereka memiliki kelebihan untuk memerintah atau memaksa orang lain untuk menuruti perintah mereka (Subiyakto, 2011).

Tokoh agama bukan hanya terlibat dalam penggalangan dana massal, tetapi juga memiliki keahlian khusus dalam mempengaruhi opini dan pilihan masyarakat. Karisma yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk menjadi pilar dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Hubungan yang erat antara tokoh agama dan komunitas mereka menjadi faktor kunci dalam menentukan arah politik yang diambil oleh masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin opini yang kuat dalam konteks politik lokal.

Pengaruh tokoh agama menengah dan besar terhadap evolusi politik umat semakin baik karena dukungan mereka terhadap masyarakat yang umumnya didasarkan pada kekuatan kharismatik. Kemampuan bertutur dengan menyelami jiwa manusia memungkinkan para pemuka agama untuk menampilkan dirinya sebagai wakil masyarakat. Oleh karena itu, berdampak pada pembentukan opini dan opini publik, seperti pemilihan pemimpin secara langsung dalam pemilu (Muazaroh& Subaidi, 2019).

K.H. Muhammad Thamrin adalah sosok yang telah menjabat sebagai anggota legislatif sejak tahun 2019 dan berhasil mempertahankan posisinya pada pemilu 2024 dengan meraih suara tertinggi. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman yang kuat dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai Pengurus MUI Kecamatan

Ciracas dan Ketua Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Kecamatan Ciracas. Dengan latar belakang tersebut, Thamrin dikenal sebagai figur yang memiliki kedalaman pengalaman dalam urusan keagamaan dan memiliki jaringan yang kuat di kalangan ulama dan masyarakat. Keberhasilannya dalam politik lokal dapat sebagian besar diatribusikan kepada kemampuannya untuk memanfaatkan pengalaman dan jaringan tersebut untuk memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat dan elite keagamaan.

Masyarakat pemilih yang mayoritas muslim menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan Thamrin. Tempat tinggal masyarakat yang disetiap gangnya memiliki masjid atau mushola serta kegiatan taklim yang rutin diadakan di wilayah tersebut membuat masyarakat sekitar memiliki fanatisme agama. Para guru yang mengajar pada taklim tersebut juga pasti mengharapkan caleg yang akan dipilih jamaahnya berasal dari kalangan elite agama atau kyai. Kegiatan seperti ini akan menjadi doktrin kepada masyarakat yang cenderung patuh terhadap guru.

Kyai dalam lingkungan masyarakat yang berada di dapil 6 pastinya memiliki sorotan khusus karena didasarkan pada kegiatan taklim yang rutin diadakan di wilayah ini. Fanatisme agama yang terjadi salah satunya adalah dengan mengikuti opini guru atau ustad terhadap salah satu caleg yang diunggulkan oleh guru mereka. K.H. Muhamad Thamrin memiliki taklim yang sangat luas terutama pada wilayah dapil 6. Dengan figur tersebut tentunya sangat mudah untuk mendapatkan suara masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, penulis memfokuskan perhatian pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wilayah Dapil 6 merupakan daerah pemilihan yang terletak di Jakarta Timur. Wilayah ini meliputi beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Makasar, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Cipayung.

Salah satu hasil menarik dari Pileg 2024 di Dapil 6 DKI Jakarta adalah kemenangan K.H. Muhammad Thamrin, seorang calon legislatif yang berhasil memenangkan kursi DPRD. Thamrin memperoleh suara tertinggi di Dapil 6, yaitu sebesar 36.274 suara. Lebih menarik lagi, Thamrin juga merupakan seorang caleg yang berhasil bertahan sejak Pileg 2019.

Kemenangan Thamrin menjadi sorotan dalam penelitian ini, mencerminkan dinamika politik lokal yang signifikan di wilayah tersebut. Melalui wawancara dengan pemilih dan analisis data, peneliti dapat memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan Thamrin, termasuk basis dukungan politik, kampanye yang efektif, dan isu-isu yang relevan bagi pemilih di Dapil 6.

Namun demikian, sebuah aspek penting yang ada dalam penelitian ini adalah peran dan figur dari Muhammad Thamrin sebagai Kyai. Sebagai seorang Kyai, Thamrin memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitas agama di daerahnya. Kehadirannya bukan hanya sebagai seorang figur politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dihormati dan diikuti oleh banyak jamaah taklim. Dalam konteks ini, kehadiran Thamrin sebagai seorang Kyai memberikan dimensi tambahan dalam kemenangannya, karena masyarakat cenderung mempercayai dan mengikuti nasihat serta arahnya secara politik maupun spiritual.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang proses politik dan dinamika pemilihan umum di Dapil 6 DKI Jakarta, serta implikasinya terhadap representasi politik di tingkat lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil Pileg di wilayah ini, diharapkan upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi politik dapat lebih terarah dan efektif.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peran dan pengaruh K.H. Muhammad Thamrin sebagai elite agama dalam pemilihan legislatif di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. K.H. Muhammad Thamrin, yang memiliki latar belakang sebagai kyai yang dihormati dan memiliki jaringan taklim yang luas, telah berhasil meraih dukungan politik yang signifikan. Masalah utama yang ingin diteliti adalah bagaimana K.H. Muhammad Thamrin memanfaatkan reputasinya sebagai figur agama untuk meraih suara tertinggi dalam pemilihan legislatif. Penelitian ini akan mengkaji peran latar belakang sosial dan agamis K.H. Muhammad Thamrin dalam proses pemilihan legislatif, serta pengaruhnya sebagai figur agama terhadap preferensi pemilih di wilayah Dapil 6. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kontribusi faktor keyakinan agama, loyalitas komunitas, dan penghargaan terhadap otoritas keagamaan dalam keberhasilan Thamrin meraih suara terbanyak. Lebih lanjut,

penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana K.H. Muhammad Thamrin memanfaatkan jaringan taklimnya untuk menggalang dukungan politik dan sejauh mana konsep kewibawaan tradisional berperan dalam kesuksesan politiknya. Implikasi keberhasilan politik K.H. Muhammad Thamrin terhadap dinamika politik di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta juga akan dianalisis. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Dapil 6 yang mencakup Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Kampung Makasar. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami secara mendalam bagaimana peran dan pengaruh seorang elite agama seperti K.H. Muhammad Thamrin dalam konteks politik lokal serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, permasalahan tersebut dapat dirincikan melalui pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana K.H. Muhammad Thamrin, sebagai seorang kyai yang dihormati dengan latar belakang sosial dan agama yang kuat memanfaatkan reputasinya untuk meraih dukungan politik dalam pemilihan legislatif di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta, dan sejauh mana faktor keyakinan agama serta konsep kewibawaan tradisional mempengaruhi preferensi pemilih dan keberhasilannya dalam meraih suara tertinggi di wilayah tersebut?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana latar belakang sosial dan agama K.H. Muhammad Thamrin mempengaruhi proses pemilihan legislatif di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Secara khusus, penelitian ini akan meneliti peran reputasi Thamrin sebagai seorang kyai yang dihormati dalam meraih dukungan politik dan mengidentifikasi sejauh mana pengaruhnya sebagai figur agama berdampak pada preferensi pemilih di wilayah tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana Thamrin memanfaatkan jaringan taklimnya untuk menggalang dukungan politik dan meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif. Fokus juga akan diberikan pada peran

konsep kewibawaan tradisional dalam keberhasilan politik Thamrin serta dampaknya terhadap dinamika politik di Dapil 6.

3. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi faktor-faktor sosial, agamis, dan jaringan taklim terhadap keberhasilan politik K.H. Muhammad Thamrin, serta implikasinya bagi hubungan antara elite agama dan politik di wilayah tersebut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang pendidikan, baik bagi penulis maupun pembaca.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru atau mendalam tentang peran elite keagamaan dalam dinamika pemilihan legislatif di tingkat lokal, khususnya dalam konteks DPRD DKI Jakarta Dapil 6 pada Pemilu tahun 2024. Hal ini dapat memperkaya literatur dan teori politik, khususnya dalam studi tentang pengaruh elit keagamaan dalam proses politik.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran elite keagamaan dalam proses pemilihan legislatif di DPRD DKI Jakarta Dapil 6 pada Pemilu tahun 2024. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada para praktisi politik, pemimpin masyarakat, dan pemilih tentang dinamika politik lokal.
2. Penelitian ini juga dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh elite keagamaan memengaruhi proses politik lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan terlibat dalam proses politik, serta dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih wakil mereka.
3. Bagi Civitas Akademik, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Ilmu Sosial Politik, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang politik lokal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam melihat dan memahami pembahasan yang ada di penelitian ini secara komprehensif. Oleh

karena itu, harus dijelaskan sebagai acuan dalam menulis skripsi yang menjabarkan setiap Bab pada penelitian skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam Bab ini, peneliti menjabarkan beberapa uraian permasalahan mengenai latar belakang peristiwa yang terjadi dalam hal ini adalah pembahasan tentang peran elit agama dalam dinamika pemilihan legislatif 2024 Selain itu, Bab ini juga berisi rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai pijakan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada Bab ini berisikan studi penelitian dengan kajian dari topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, dalam Bab ini menunjukkan landasan teori dan konsep yang akan digunakan peneliti dalam memahami dan menganalisa fenomena yang dibahas. Setelah itu, ada kerangka pemikiran yang menjelaskan alur pemikiran berjalannya penelitian dengan penegasan teori dan fakta kajian kepustakaan yang dijadikan landasan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam Bab ini, peneliti mengemukakan metode penelitian yang digunakan yang berisikan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM : Pada penelitian ini, peneliti membahas gambaran umum tentang wilayah Dapil 6, termasuk deskripsi wilayah penelitian, kondisi geografis, penduduk, profil daerah, serta identitas elit yang relevan dalam konteks penelitian ini.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada Bab ini berisikan hasil penelitian dengan menggambarkan hasil observasi di lapangan untuk menunjang penelitian dan dilanjutkan dengan analisa penulis terkait dengan penelitian yang diambil.

BAB VI PENUTUP: Dalam Bab ini berisikan kesimpulan. Selain itu, Bab ini juga menjadi bagian terakhir dalam penelitian.